

LKPD

Pendidikan Pancasila

Tantangan dalam Upaya Mempertahankan
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Nama Kelompok:
Kelas:





Tantangan dalam Upaya Mempertahankan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- **Capaian Pembelajaran**

- Peserta didik mampu mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks wawasan nusantara; berpartisipasi aktif untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- **Tujuan Pembelajaran**

- Melalui model problem base learning, diskusi kelompok dan E-LKPD mengenai kasus tantangan dan upaya dalam mempertahankan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, peserta didik mampu menganalisis penyebab dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan wilayah NKRI dengan benar (C4)

Materi

1. Tantangan dalam Mempertahankan Wilayah NKRI

Indonesia, sebagai negara kesatuan dengan berbagai pulau, suku, dan agama, menghadapi dua kategori ancaman utama: ancaman militer dan ancaman non-militer.

- Ancaman Militer
- Ancaman Militer: Serangan fisik, invasi, pelanggaran wilayah, dan terorisme bersenjata dapat mengancam kedaulatan NKRI.
- Pemberontakan dan Spionase: Kelompok bersenjata yang menggulingkan pemerintahan dan upaya mendapatkan informasi rahasia.
- Gangguan Keamanan di Laut dan Udara: Ancaman seperti pembajakan, penyelundupan, dan pencemaran lingkungan di wilayah perairan Indonesia.

- Ancaman Non-militer:
- Wilayah yang Luas: Kesulitan dalam pengawasan dan pelayanan di daerah terpencil.
- Akses Antardaerah Kurang Setara: Ketimpangan akses di sektor ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur antara daerah satu dan lainnya.
- Persebaran Penduduk yang Tidak Merata: Ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya yang menciptakan ketegangan sosial.
- Peningkatan Kualitas SDM: Tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk memperkuat ketahanan negara.
- Keragaman Suku, Agama, dan Kepercayaan: Perbedaan yang dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan bijaksana.
- Isu Pertahanan dan Keamanan: Ancaman terorisme, ancaman siber, dan ketegangan di perbatasan yang mempengaruhi stabilitas NKRI.

2. Upaya Pemerintah dalam Mempertahankan Wilayah NKRI

Pemerintah memiliki berbagai langkah untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas wilayah Indonesia:

- Keamanan Nasional: Melindungi negara dari ancaman luar dan dalam melalui pengawasan perbatasan dan pemberantasan kejahatan.
- Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri: Membangun hubungan dengan negara tetangga untuk mengurangi risiko konflik.
- Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara.
- Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Menguatkan kemampuan masyarakat dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
- Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam: Menjaga kelestarian alam dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana.

3. Peran Masyarakat dalam Mempertahankan NKRI

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempertahankan NKRI, seperti:

- Menjaga Persatuan: Memperkuat integrasi sosial dan menghindari konflik antar kelompok.
- Meningkatkan Kepedulian terhadap Keamanan: Berpartisipasi dalam kegiatan keamanan seperti ronda malam.
- Bela Negara: Berperan dalam menjaga ketertiban dan meningkatkan kualitas diri.
- Partisipasi dalam Demokrasi: Aktif dalam pemilu dan proses politik lainnya untuk menjaga demokrasi yang sehat.
- Menghargai Hukum: Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku untuk menciptakan ketertiban.
- Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Meningkatkan ekonomi lokal untuk mendukung stabilitas negara.
- Menjaga Alam dan Sumber Daya Alam: Berpartisipasi dalam pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.





Petunjuk Kerja Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

I. Persiapan

1. Baca Instruksi: Bacalah dengan seksama petunjuk di LKPD.
2. Siapkan Alat dan Bahan: Pastikan semua alat yang diperlukan tersedia, seperti buku catatan, alat tulis, dan akses internet jika diperlukan.

II. Analisis dan Diskusi (Kelompok)

1. Pahami Kasus/Topik: Baca dengan teliti topik atau kasus yang akan dianalisis.
2. Diskusi dengan Kelompok: Bahas soal bersama kelompok dan cari referensi tambahan jika perlu.
3. Bagi Tugas: Tentukan pembagian tugas antar anggota kelompok untuk menjawab soal secara efektif.

III. Penulisan Jawaban

1. Jawab Pertanyaan: Tulis jawaban dengan jelas dan lengkap.
2. Analisis Sistematis: Jawab dengan urutan yang terstruktur, mulai dari penjelasan latar belakang, penyebab, hingga solusi.
3. Cantumkan Referensi: Jika menggunakan sumber tambahan, sertakan referensinya. Contohnya mencantumkan buku atau link internet yang menjadi sumber bacaan

IV. Presentasi

1. Siapkan Presentasi: Buat presentasi singkat, jelas, dan fokus pada poin utama. Bisa menggunakan powerpoint, mind mapping, atau laporan tulisan yang kalian tulis melalui Liveworksheet.
2. Latihan: Berlatih untuk menyampaikan materi dengan percaya diri.
3. Tanya Jawab: Siapkan jawaban untuk pertanyaan dari audiens.

V. Penutupan

1. Review Jawaban: Periksa kembali hasil kerja dan pastikan tidak ada yang terlewat.
2. Serahkan Kerja: Serahkan hasil kerja sesuai waktu yang ditentukan.
3. Evaluasi Diri: Lakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dipelajari.



Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, angkat bicara mengenai dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebanyak 6 juta data NPWP dilaporkan telah diretas dan dijual di dark web dengan harga Rp 150 juta.

Bjorka, seorang hacker, diduga bertanggung jawab atas pembocoran 6 juta data NPWP tersebut, termasuk data milik Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, dan beberapa pejabat publik lainnya.

Dari 6 juta data yang diretas, sebanyak 25 sampel data penting telah dibagikan, yang di antaranya termasuk nama-nama pejabat publik. Beberapa di antaranya adalah data milik Presiden Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kebocoran data dari instansi pemerintah ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Bocornya data dari tangan pemerintah ini sudah terjadi yang ke sekian kali.

- Dugaan data 34 juta paspor WNI bocor

Sebanyak 34 juta data paspor warga negara Indonesia (WNI) diduga bocor dan dijual di situs dark web. Pengamat keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai bahwa banyak dari data tersebut tidak valid.

Alfons Tanujaya menyebut data tersebut dijual dengan harga US\$ 10 ribu, atau sekitar Rp 150,66 juta di internet. "Dari sampel data yang diberikan sekitar 1 juta itu, masih banyak yang tidak valid karena mengandung data pemegang paspor yang berumur lebih dari 100 tahun," ujar Alfons dalam video yang dikirim ke Tempo, Kamis, 6 Juli 2023.

Menurut pengujian yang dilakukan oleh Vaksincom, data yang bocor tersebut berisi informasi yang hanya dimiliki oleh pihak imigrasi, seperti nomor paspor dan NIKIM atau nomor identitas nasional.



Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

- Dugaan kebocoran 337 juta data dukcapil

Kasus kebocoran data kembali menarik perhatian masyarakat Indonesia. Kali ini, data yang diduga bocor berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Informasi ini disampaikan oleh pakar keamanan siber Teguh Aprianto melalui cuitannya di Twitter. Ia menyebutkan bahwa sekitar 337 juta data telah bocor. Konsultan Keamanan Siber dan Pendiri Ethical Hacker Indonesia tersebut mengungkapkan bahwa data yang bocor meliputi nama, nomor Kartu Keluarga, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, serta nomor akta lahir/nikah dan lainnya.

- Data penduduk di BPJS Kesehatan bocor

Pada Mei 2021, Kepolisian RI memanggil Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghulfron Mukti, terkait kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan yang dijual di Raid Forums. Brigadir Jenderal Slamet Uliandi, Direktur Tindak Pidana Siber, menyatakan bahwa pihaknya akan memeriksa pegawai BPJS yang mengelola data masyarakat, dan kemudian melanjutkan dengan forensik digital. Selain itu, Polri membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Data yang bocor tersebut diduga mencakup 279 juta penduduk Indonesia yang menjadi peserta BPJS Kesehatan, termasuk nomor induk kependudukan, KTP, nomor telepon, email, nama, alamat, dan informasi gaji.

- 252 juta data pemilu 2024 bocor

Data daftar pemilih tetap (DPT) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga bocor dan diperjualbelikan di forum daring. Seorang pengguna anonim dengan nama Jimbo mengunggah 252 juta data DPT yang diklaim berasal dari situs KPU. Data pribadi yang bocor meliputi NIK, nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, dan informasi lainnya.



Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

Setelah mengetahui adanya peretasan di situs KPU, Hasyim segera melakukan pengecekan terhadap sistem informasi yang dilaporkan oleh pelaku peretasan, yaitu Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), dan menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai langkah penanganan terhadap peretasan tersebut.

- Kebocoran data institusi publik

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyoroti terulangnya kasus kebocoran data dari institusi publik, menunjukkan bahwa pemerintah dianggap tidak belajar dari kesalahan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar, menyatakan bahwa rangkaian insiden kebocoran data di institusi publik mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan pemerintah terhadap penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). "Sebagai pengendali, pemerintah diwajibkan menjamin kerahasiaan dan keharusan menerapkan sistem keamanan yang kuat," kata Wahyudi dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo, Selasa, 13 Agustus 2024.

Sumber: Tempo.com

<https://www.tempo.co/hukum/sederet-kasus-kebocoran-data-terbaru-6-juta-data-npwp-diretas-bjorka-siapa-tanggung-jawab--7201>



Dalam era digital saat ini, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara tidak hanya datang dari serangan fisik atau militer, tetapi juga dari ancaman siber. Kejahatan siber, seperti peretasan data, menjadi salah satu tantangan besar yang dapat merusak kedaulatan negara dan mengancam stabilitas NKRI. Kejahatan siber ini memiliki potensi yang besar untuk merusak sistem yang menyangkut pertahanan, keamanan, serta perekonomian negara. Analisislah kasus ini bersama anggota kelompok mu berdasarkan pertanyaan dibawah ini:

Uraikanlah kejadian yang terjadi dalam kasus kebocoran data tersebut!

Analisislah faktor penyebab terjadinya kejahatan siber atau kebocoran data seperti yang tercantum dalam kasus ini?

Analisislah upaya yang bisa diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi dan mencegah kejadian kebocoran data seperti ini?

Selamat Mengerjakan!

